

THE DYNAMICS OF THE SAMBAS SULTANATE DURING THE REIGN OF SULTAN MUHAMMAD ALI TSAFIUDDIN (1815–1828)

DINAMIKA KESULTANAN SAMBAS PADA MASA SULTAN MUHAMMAD ALI TSAFIUDDIN (1815–1828)

Nuraidi ^{1a}, Andang Firmansyah^{2b}, M. Rikaz Prabowo^{3c}

¹²³Pendidikan Sejarah, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak

^af1231221029@student.untan.ac.id

^bandang.firmansyah@fkip.untan.ac.id

^cm.rikaz.prabowo@fkip.untan.ac.id

(*) Corresponding Author

f1231221029@student.untan.ac.id

How to Cite: Nuraidi, Firmansyah, A., Prabowo, R. M. (2026). The Dynamics Of The Sambas Sultanate During The Reign Of Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin (1815–1828). doi: [10.36526/js.v3i2.7692](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.7692)

Received : 08-03-2026
Revised : 22-07-2026
Accepted : 10-08-2026

Keywords:

Sultan Muhammad
Ali Tsafiuddin,
Prince Anom,
Sultanate of
Sambas

Abstract

This study examines the political and social dynamics of the Sambas Sultanate during the reign of Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin (1815–1828), focusing on the challenges to sovereignty faced by the sultanate in the early nineteenth century. The research employs the historical method, including topic selection, source collection (heuristics), source criticism (verification), interpretation, and historiographical writing, combined with political and sociological approaches to analyze power relations and regional contexts. The findings show that the sultan's reign occurred during a period of significant transformation marked by increasing Dutch colonial intervention and internal instability arising from conflicts among Chinese mining kongsis. These pressures gradually weakened the authority of the sultanate and limited the effectiveness of traditional governance. In response, Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin pursued strategic measures aimed at maintaining political stability while adapting to shifting regional power structures. This study argues that the erosion of the Sambas Sultanate's sovereignty resulted not only from colonial expansion but also from internal socio-economic dynamics. The research thus contributes to the historiography of West Kalimantan by highlighting the complex interactions between local authority, economic communities, and colonial power in the nineteenth century.

PENDAHULUAN

Kesultanan Sambas merupakan salah satu kesultanan Islam terbesar di Kalimantan Barat. Sejak berdiri pada 9 Juli 1631 M, kesultanan ini berkembang menjadi sebuah kekuasaan tradisional yang berperan penting dalam dinamika politik, sosial, dan ekonomi lokal. Kekuasaan tradisional ini juga berinteraksi dengan berbagai aktor eksternal, seperti jaringan perdagangan maritim regional serta kekuatan kolonial Eropa. Sepanjang sejarahnya, dari mulai berdiri hingga hingga masa pendudukan Jepang yang menggugurkan sultan terakhir, Kesultanan Sambas telah dipimpin sebanyak 15 orang sultan. Para sultan ini tentunya membawa corak kepemimpinan yang khas dalam merespon dinamika zamannya. Secara berturut-turut sultan yang pernah memimpin Kesultanan Sambas yaitu: 1) Sultan Muhammad Tsafiuddin, 2) Sultan Muhammad Tajuddin, 3) Sultan Umar Aqamaddin, 4) Sultan Abubakar Kamaluddin, 5) Sultan Umar Aqamaddin II, 6) Sultan Ahmad Tajuddin, 7) Sultan Abubakar Tajuddin, 8) Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin, 9) Sultan Usman Kamaludin, 10) Sultan Umar Aqamaddin III, 11) Sultan Abubakar Tajuddin II, 12) Sultan Umar Kamaluddin, 13) Sultan Muhammad Tsafiuddin II, 14) Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin II, 15) Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Tsafiuddin (Rahman et al., 2001, hal. 38).

Dari semua sultan tersebut, salah satu sultan yang memainkan peran penting dalam perkembangan Kesultanan Sambas adalah Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin. Masa pemerintahan beliau berlangsung antara tahun 1815 M hingga 1828 M. Sumber lokal maupun sumber kolonial mengenal sultan ini dengan sebutan Pangeran Anom. Dalam berbagai catatan sejarah, ia digambarkan sebagai tokoh yang kontroversial sekaligus sulit ditandingi pada masanya. Pangeran Anom dikenal gemar merantau dan mengarungi lautan, serta terlibat dalam upaya menumpas bajak laut yang mengganggu lalu lintas perdagangan Kesultanan Sambas dan negeri-negeri lain (Lontaan, 1975, hal. 136–137). Namun, dalam sejumlah sumber kolonial Barat, aktivitas tersebut justru dilabeli sebagai praktik pembajakan. Perbedaan representasi ini menunjukkan adanya konstruksi diskursif yang mencerminkan relasi kuasa antara otoritas lokal dan narasi kolonial dalam mendefinisikan legitimasi politik di wilayah maritim Nusantara.

Terlepas dari kontroversi tersebut, Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin bisa dibilang merupakan seorang pemimpin yang memiliki pandangan politik yang lebih maju dibandingkan para pendahulunya. Hal ini tidak terlepas dari pengalamannya sebagai pelaut yang telah berkelana ke berbagai penjuru negeri. Pengalaman tersebut memperluas wawasannya melalui interaksi langsung dengan beragam komunitas. Masa pemerintahannya di Kesultanan Sambas ditandai dengan sejumlah peristiwa penting terhadap dinamika politik, sosial dan ekonomi. Pada 3 Februari 1819 pemerintah Hindia Belanda mengikat Kesultanan Sambas dengan mengadakan kontrak politik yang menggerus kedaulatan istana. Selain itu antara periode 1822-1824, terjadi Perang Kongsong antara dua kongsong yaitu, *Sam Tiau Kiu* dan *Thai Kong* di wilayah Montrado (Heidhues, 2008, hal. 74). Situasi geopolitik yang kompleks tersebut menempatkan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin dalam posisi yang cukup sulit. Meskipun demikian, ia tetap berupaya mempertahankan kedaulatan dan stabilitas Kesultanan Sambas di tengah berbagai tekanan yang muncul pada masa tersebut.

Meskipun memiliki peran yang sentral dalam sejarah perkembangan Kesultanan Sambas, pembahasan mengenai kepemimpinan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin (1815–1828) masih relatif terbatas. Literatur yang tersedia sejauh ini, seperti yang ditulis oleh Ismail (1994), lebih berfokus pada upaya penguasa Melayu dalam mengonsolidasikan kekuasaan terhadap masyarakat Dayak dan Tionghoa di wilayah pedalaman. Sementara itu, kajian Rahman et al. (2001) lebih menekankan pada pembahasan mengenai perjalanan hidup Pangeran Anom sebelum menjadi sultan. Adapun tulisan Fahmi (2004) lebih didominasi oleh penelusuran silsilah serta hubungan keluarga di lingkungan Kesultanan Sambas, termasuk yang berkaitan dengan Pangeran Anom. Beberapa karya tersebut cenderung hanya mencantumkan nama dan masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin secara singkat. Secara umum, kajian-kajian tersebut masih minim memaparkan analisis yang mendalam mengenai arah kebijakan, serta dinamika sosial-politik selama masa kekuasaannya. Dengan demikian, historiografi yang ada masih menyisakan kesenjangan kajian terkait bagaimana dinamika perubahan kekuasaan pada awal abad ke-19 berlangsung di Kesultanan Sambas.

Kekosongan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian historis yang belum banyak disentuh, padahal periode ini berlangsung dalam konteks transisi penting, yakni pergeseran dari kedaulatan penuh Kesultanan Sambas menuju meningkatnya intervensi kekuatan kolonial. Kondisi ini menjadikan masa kepemimpinan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin sebagai salah satu fase strategis yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kepemimpinan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin dengan menempatkannya dalam konteks dinamika politik lokal dan kolonial pada masanya. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana riwayat kehidupan Pangeran Anom; (2) bagaimana kondisi sosial-politik pada masa Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin berkuasa; dan (3) bagaimana kondisi ekonomi Kesultanan Sambas pada periode tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan historis yang menempatkan kepemimpinan lokal dalam kerangka relasi kekuasaan, komunitas ekonomi, dan kolonialisme, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam khazanah sejarah Kesultanan Sambas serta sumbangan

historiografis bagi kajian sejarah lokal di Kalimantan Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai peran aktor politik lokal dalam merespons proses transformasi kekuasaan di wilayah maritim Nusantara pada awal abad ke-19, sekaligus memperkaya pengembangan kajian sejarah lokal di Kalimantan Barat.

METODE

Dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah dipahami sebagai seperangkat prinsip dan kaidah sistematis yang dirumuskan untuk memfasilitasi proses pengumpulan sumber-sumber historis, melakukan penilaian kritis terhadap validitas dan reliabilitasnya, serta menyusun sintesis komprehensif atas temuan yang diperoleh. Secara ringkas, metode sejarah dapat dipandang sebagai suatu sistem prosedural yang dirancang untuk mencapai kebenaran historis (Garraghan, 1946, hal. 33). Metode sejarah digunakan untuk menelaah peristiwa masa lampau melalui prosedur-prosedur yang tetap berada dalam koridor keilmuan yang bersifat empiris dan sistematis. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya berupaya menghadirkan fakta-fakta sejarah secara akurat, tetapi juga menafsirkan makna peristiwa tersebut dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya.

Penelitian ini secara operasional mengikuti tahapan penelitian sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2001, hal. 91), yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber (heuristik), (3) verifikasi atau kritik sumber, (4) interpretasi yang mencakup analisis dan sintesis, serta (5) penulisan historiografi. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan guna memastikan bahwa rekonstruksi sejarah yang dihasilkan memiliki dasar sumber yang kuat serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Topik penelitian ini dipilih melalui identifikasi terhadap celah dalam kajian historiografi yang selama ini masih minim membahas secara mendalam mengenai kepemimpinan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin dalam konteks dinamika politik Kesultanan Sambas pada awal abad ke-19. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan orisinalitas dan relevansi historis, sekaligus potensinya dalam memperkaya narasi sejarah lokal di Kalimantan Barat yang belum banyak diungkap. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang menjadi rujukan utama antara lain Laporan Umum mengenai Residensi Sambas tahun 1823 yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sementara itu, sumber sekunder mencakup karya-karya sejarah yang relevan seperti Ismail (1994), Rahman et al.(2001), dan Fahmi (2004). Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui penelusuran di berbagai repositori digital, perpustakaan, serta koleksi arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Setelah proses pengumpulan sumber (heuristik), seluruh data yang diperoleh kemudian melalui tahap verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber dilakukan melalui dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan untuk menilai keaslian dan autentisitas sumber, termasuk konteks produksi arsip, latar institusi pembuat dokumen, serta kondisi fisik sumber. Sementara itu, kritik internal dilakukan untuk menilai kredibilitas isi sumber, konsistensi informasi antar-sumber, serta kemungkinan adanya bias, terutama dalam sumber-sumber kolonial yang sering kali merepresentasikan kepentingan politik tertentu.

Dalam tahap interpretasi, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis historis-kontekstual yang menempatkan tindakan dan kebijakan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin dalam kerangka dinamika politik, ekonomi, dan kolonial pada awal abad ke-19. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga menganalisis hubungan antara aktor, struktur kekuasaan, dan situasi geopolitik yang memengaruhi kebijakan kesultanan. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan perbedaan perspektif antara sumber lokal dan sumber kolonial guna memahami bagaimana representasi terhadap tokoh dan peristiwa sejarah dibentuk oleh kepentingan masing-masing pihak. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan rekonstruksi historis yang koheren mengenai dinamika kepemimpinan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin dalam menghadapi intervensi kolonial serta

konflik regional pada masanya. Tahap terakhir adalah penulisan historiografi, yaitu penyusunan keseluruhan hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis, argumentatif, dan berbasis pada bukti-bukti historis yang telah diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Pangeran Anom

Pangeran Anom terlahir dengan nama Raden Pasu. Ia merupakan putra pertama Sultan Umar Aqamaddin II (Sultan Sambas ke-5) dari istri ketiganya, Mas Ayu. Pangeran Anom dilahirkan pada Sabtu, 3 Muharram 1181 H (30 Mei 1767 M). Pangeran Anom memiliki dua adik dari ibunya tersebut: Raden Semar dan Urai Kubu (Fahmi, 2004, hal. 15). Pangeran Anom sendiri memegang jabatan di istana sebagai Pangeran Bendahara. Kata *anom* berarti “muda”, namun dalam konteks lain juga merujuk pada putra sultan yang berwajah tampan. Panggilan ini telah melekat padanya sejak masa muda, saat masa pemerintahan ayahandanya. Nama tersebut diberikan karena kemampuan melautnya yang sudah mumpuni sejak usia muda. Rahman et al. (2001, hal. 55), menyebut bahwa sejak muda, Pangeran Anom gemar bergaul dengan para pelaut. Nama “Pangeran Anom” begitu melekat pada Raden Pasu hingga ia naik takhta sebagai sultan.

Pangeran Anom muda memperoleh pendidikan agama Islam yang baik di lingkungan istana. Kuat dugaan bahwa ia dididik secara langsung oleh Imam Ya'kub yang kala itu bertugas untuk mengajarkan agama Islam kepada kerabat istana. Meskipun berlatar belakang Islam, sebagai bangsawan ia tetap dituntut memiliki wawasan luas. Namun, pembentukan karakternya tidak hanya berlangsung di lingkungan istana. Sejak usia muda ia banyak bergaul dengan para pelaut dan pedagang yang beraktivitas di pelabuhan Sambas. Interaksi tersebut membentuk minatnya terhadap dunia maritim dan mendorongnya untuk sering melakukan pelayaran ke berbagai wilayah (Rahman et al., 2001, hal. 55). Pengalaman pelayaran yang luas ini menjadikannya seorang bangsawan yang memiliki pengetahuan praktis mengenai jaringan perdagangan, kondisi perairan, serta dinamika kekuatan maritim di kawasan pesisir barat Kalimantan.

Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Sambas, Pangeran Anom memegang jabatan sebagai Pangeran Bendahara. Selain menjalankan fungsi administratif di istana, ia juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan jalur pelayaran yang menjadi urat nadi perdagangan kesultanan. Dalam konteks politik maritim Asia Tenggara pada masa itu, aktivitas pengawasan laut—termasuk penindakan terhadap kapal yang melanggar aturan pelayaran atau tidak membayar bea—merupakan bagian dari praktik kedaulatan yang lazim dilakukan oleh kekuasaan lokal (Francis, 1856, hal. 321; Lontaan, 1975, hal. 137). Oleh karena itu, reputasi Pangeran Anom sebagai pelaut tangguh tidak hanya berkaitan dengan keterampilan pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai simbol otoritas maritim Kesultanan Sambas. Reputasi tersebut secara tidak langsung memperkuat legitimasi politiknya sebagai calon pemimpin yang mampu menjaga kepentingan ekonomi dan keamanan wilayah kesultanan. Langkah ini berupaya untuk menjamin aktivitas perdagangan di wilayahnya berlangsung aman, teratur, dan disegani oleh negeri-negeri tetangga.

Namun demikian, gambaran mengenai Pangeran Anom dalam sumber-sumber Barat sering kali berbeda secara signifikan. Dalam sejumlah catatan kolonial, ia dilukiskan sebagai sosok keras, nekat, dan bahkan disebut sebagai bajak laut yang ditakuti di perairan barat Kalimantan (De Keyser, 1876, hal. 159; Ritter, 1861, hal. 285). Label tersebut tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang kolonial yang cenderung mendefinisikan praktik kekuasaan maritim lokal sebagai tindakan perompakan. Perspektif ini bahkan sering secara serampangan menggeneralisasi kelompok masyarakat tertentu sebagai bajak laut (Atsushi, 2010, hal. 83; Lopian, 2009, hal. 159). Dalam banyak kasus di kawasan Asia Tenggara pada masa itu, aktivitas pengawasan laut oleh penguasa lokal sering dipandang oleh kekuatan Eropa sebagai ancaman terhadap kepentingan perdagangan mereka (Baihaqi et al., 2025, hal. 336). Dengan demikian, penyematan label “pirate” terhadap Pangeran Anom dapat dipahami sebagai bagian dari konstruksi wacana kolonial yang berupaya mendeligitimasi otoritas maritim penguasa lokal.

Ketegangan antara kepentingan kolonial dan otoritas maritim Kesultanan Sambas tersebut kemudian memicu konfrontasi terbuka. Pada Oktober 1812, Inggris melancarkan ekspedisi militer pertama terhadap Kesultanan Sambas dengan tujuan menekan aktivitas maritim yang mereka anggap mengganggu perdagangan regional. Serangan awal ini tidak berhasil mencapai tujuannya karena pasukan Sambas di bawah pimpinan Pangeran Anom mampu memberikan perlawanan yang kuat. Namun demikian, Inggris kemudian mengorganisasi ekspedisi militer kedua yang lebih besar pada Juni 1813, yang pada akhirnya berhasil menguasai situasi dan memaksa pihak Kesultanan Sambas berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam situasi konflik tersebut, Sultan yang berkuasa saat itu, Sultan Abubakar Tajuddin, memilih mengungsi ke wilayah pedalaman untuk menghindari tekanan militer. Karena usianya yang telah lanjut serta kondisi persembunyian yang berat, kesehatan sultan semakin menurun hingga akhirnya wafat pada 20 Ramadan 1226 H (1 September 1814). Sebelum wafat, Sultan Abubakar Tajuddin menunjuk Pangeran Anom sebagai penerusnya untuk naik takhta sebagai sultan berikutnya (Macdonald, 1840, hal. 332).

Penunjukan tersebut kemudian disetujui oleh para pembesar istana. Di antara para kerabat kerajaan, Pangeran Anom dipandang sebagai figur yang paling memiliki kapasitas kepemimpinan, terutama karena pengalaman politik dan reputasi maritim yang dimilikinya. Pada Sabtu, 1 Muharram 1231 H (2 Desember 1815), Pangeran Anom secara resmi dinobatkan sebagai Sultan Sambas ke-8 dengan gelar Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin. Sementara itu, sebagian sumber menyebutnya dengan Sultan Anom Muhammad Ali Tsafiuddin atau sekadar Sultan Anom (Francis, 1856, hal. 323; Veth, 2017a, hal. 325). Bahkan dalam catatan kolonial, namanya masih tertulis sebagai Pangeran Anom saja tanpa gelar sultan meskipun ia telah menduduki jabatan sultan (ANRI, *Borneo Westerafdeeling*, No.300). Nama "Pangeran Anom" begitu melekat pada identitasnya sehingga sulit dilepaskan, meskipun ia telah menyandang gelar resmi Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin.

Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin memerintah Kesultanan Sambas selama hampir tiga belas tahun. Pada tahun-tahun terakhir masa pemerintahannya, kondisi kesehatannya menurun akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Ia wafat pada malam antara 19 dan 20 Juli 1828 pada usia sekitar 61 tahun (*Javasche Courant*, 11 Oktober 1828). Setelah kemangkatannya, ia dikenang dengan gelar Murhum Anom sebagai bentuk penghormatan atas perannya dalam sejarah Kesultanan Sambas.

Kondisi Sosial-Politik Semasa Kepemimpinan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin

Kontrak Politik

Pada masa akhir pemerintahan Inggris di Jawa (1811–1816), Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin sempat mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kolonial Inggris. Situasi Kesultanan Sambas ketika itu memang berada dalam kondisi politik yang rapuh, terutama setelah ekspedisi militer Inggris yang melemahkan struktur kekuasaan kesultanan (Van Sandick, 1909, hal. 282). Dalam permohonannya, Sultan menekankan bahwa ia menghadapi ketidakstabilan politik baik dari dalam maupun luar istana, termasuk ancaman dari Kesultanan Pontianak serta kekuatan kongsi Tionghoa yang dinilai semakin tangguh dan berpotensi mengurangi otoritasnya atas wilayah pertambangan dan perdagangan regional.

Selain itu, langkah diplomatik tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya Sultan untuk memanfaatkan rivalitas kekuatan Eropa guna memperoleh perlindungan politik sekaligus menuntut tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh ekspedisi militer Inggris sebelumnya. Sayangnya, permintaan bantuan tersebut tidak pernah terwujud. Ketika itu kekuasaan Inggris atas Jawa telah berakhir setelah penandatanganan Anglo-Dutch Treaty 1814. Perjanjian tersebut mengatur pengembalian sebagian besar wilayah jajahan Belanda yang sebelumnya diduduki Inggris selama masa perang Napoleon.

Setelah pemulihan kekuasaan Belanda di Nusantara, Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin kembali mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada 4 Maret

1817, Sultan mengirimkan surat kepada Residen Semarang, H. A. Parvé (Veth, 2017b, hal. 326). Motif dan isi surat tersebut pada dasarnya mencerminkan strategi politik yang sama seperti ketika ia berhubungan dengan pihak Inggris, yakni mencari dukungan eksternal untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi tekanan regional. Residen Semarang merespons secara akomodatif melalui surat balasan bertanggal 1 Mei 1817. Namun, karena pemerintah Belanda pada saat yang sama tengah menghadapi konflik di Maluku, terutama Perlawanan Pattimura tahun 1817, perhatian kolonial terhadap Sambas menjadi terbatas. Baru pada tahun 1818 realisasi permintaan tersebut dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Belanda memperluas kembali pengaruhnya di wilayah Kalimantan Barat. Perwakilan Belanda tiba di Sambas pada 2 September 1818. Pada 6 September 1818 sekitar pukul 09.00, bendera Belanda secara simbolis dikibarkan di wilayah kesultanan sebagai penanda kembalinya kehadiran kekuasaan kolonial.

Pada 3 Februari 1819, Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin secara resmi menandatangani kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda melalui perwakilannya, Komisaris Nahuys (ANRI, *Borneo Westerafdeeling*, No.255). Peristiwa ini menandai transformasi penting dalam hubungan politik antara Kesultanan Sambas dan kekuasaan kolonial. Melalui perjanjian tersebut, posisi Sultan secara bertahap mengalami pembatasan karena pemerintah kolonial memperoleh legitimasi formal untuk ikut campur dalam berbagai urusan pemerintahan kesultanan. Belanda tidak hanya memperoleh hak untuk melakukan intervensi dalam administrasi istana, tetapi juga menempatkan diri sebagai kekuatan yang berbagi otoritas dengan Sultan dalam mengelola wilayah Sambas. Lebih jauh, perjanjian tersebut memberikan kepada pemerintah Hindia Belanda kendali atas wilayah Sambas beserta sebagian besar pendapatan yang dihasilkannya. Kewenangan untuk mengatur penduduk non-inlander juga dialihkan ke dalam yurisdiksi kolonial. Dengan demikian, kontrak tersebut pada dasarnya merepresentasikan proses integrasi bertahap Kesultanan Sambas ke dalam struktur kekuasaan kolonial.

Seiring berjalannya waktu, sultan menyadari bahwa langkah tersebut justru dimanfaatkan pemerintah kolonial untuk mengambil keuntungan sepihak. Pendapatan dan kekuasaannya justru merosot akibat ketentuan perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, sultan mulai bersikap skeptis terhadap kebijakan Belanda yang dianggapnya hanya bertujuan memperkaya diri sendiri. Sebagai bentuk respons terhadap situasi tersebut, Sultan mulai mengabaikan sebagian kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Sultan masih memperoleh upeti secara pribadi melalui berbagai penyerahan dari masyarakat Sambas sebagai bentuk loyalitas. Padahal menurut ketentuan kontrak, seluruh pemasukan tersebut seharusnya masuk ke dalam kas kolonial. Pada 25 September 1819, Sultan kembali disodorkan pembaruan kontrak. Tidak ada perubahan substansial dalam isi perjanjian ini, yang dilakukan hanyalah penyempurnaan terjemahan dalam bahasa Melayu (ANRI, *Borneo Westerafdeeling*, No.255). Langkah ini sengaja diambil pemerintah kolonial untuk mempersempit ruang interpretasi Sultan dan mencegahnya memberlakukan ketentuan perjanjian secara fleksibel.

Guna mencegah praktik pungutan di luar ketentuan kontrak, pemerintah kolonial berencana meningkatkan gaji Sultan sebagai bentuk kompensasi politik. Sebagai bagian dari strategi tersebut, pihak kolonial mengajukan sebuah *ampliatie* (perluasan) terhadap kontrak sebelumnya. Inti ketentuan dalam kontrak baru ini sebenarnya telah dirancang sejak lama sebagai upaya memperkuat kendali kolonial. Namun, penetapan definitifnya sempat tertunda akibat ketegangan yang melibatkan komunitas Tionghoa di wilayah pertambangan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kolonial di Sambas juga sangat dipengaruhi oleh dinamika yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan. Kontrak terbaru tersebut akhirnya ditandatangani oleh Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin pada 11 Mei 1823 (ANRI, *Borneo Westerafdeeling*, No.255). Setelah perluasan kontrak tersebut, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi merevisi perjanjian formal dengan Sultan hingga akhir masa kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hubungan politik yang terbentuk pada awal 1820-an dianggap sudah cukup untuk memastikan dominasi kolonial atas Kesultanan Sambas.

Perang Kongsi

Pada akhir abad ke-18, kongsi-kongsi di wilayah Sambas semakin sering terlibat dalam pertikaian internal yang menyebabkan banyak di antaranya bubar atau diakuisisi oleh kongsi yang lebih kuat. Jumlah kongsi yang pada masa kejayaannya pernah mencapai 36 terus menyusut akibat konflik yang berkepanjangan. Pada tahun 1807, perselisihan kembali meletus dan baru berakhir pada akhir 1808, menyisakan hanya tujuh kongsi dalam federasi Fo Sjoen (Ismail, 1994, hal. 145). Federasi inilah yang kemudian dihadapi pemerintah Hindia Belanda ketika mulai memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, dinamika kongsi menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin dalam menjalin kontak politik dengan pemerintah kolonial. Konflik internal antar-kongsi tidak hanya memengaruhi stabilitas wilayah pertambangan, tetapi juga secara bertahap menyeret fraksi-fraksi istana dan melemahkan otoritas sultan sebagai penguasa nominal atas wilayah tersebut. Dengan kata lain, ketegangan antar-kongsi tidak lagi semata-mata merupakan konflik komunitas pertambangan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan politik regional yang berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan Kesultanan Sambas.

Namun, setelah kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda ditandatangani, Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin merasa kecewa karena pemerintah kolonial tidak menunjukkan kemajuan berarti dalam menangani persoalan kongsi. Wilayah kongsi, khususnya Montrado, tetap berada dalam suasana tegang. Kehadiran otoritas kolonial bahkan dalam beberapa hal memperuncing sentimen terhadap kekuasaan lokal maupun kolonial, sehingga anggota kongsi kerap melancarkan penyerangan terhadap pejabat Belanda sebagai bentuk protes. Pada saat yang sama, pemerintah Hindia Belanda belum mampu merespons secara efektif karena perhatian militernya masih terfokus pada Ekspedisi Palembang I (1819). Baru setelah kemenangan dalam Ekspedisi Palembang II (1821), pemerintah kolonial mulai mengalihkan perhatian ke Borneo Barat dan mengirimkan pasukan pada 28 Juli 1822 (Tobias, 1828, hal. 65; Van Doren, 1865, hal. 5).

Pada tahap awal, kehadiran pasukan tersebut lebih dimaksudkan sebagai tekanan politik daripada operasi militer terbuka. Pemerintah kolonial berupaya memaksa pihak kongsi menerima kontrak yang diajukan dan tunduk pada otoritas kolonial melalui negosiasi dan ancaman kekuatan militer. Hasilnya, pada 27 Oktober 1822 para kepala kongsi menyepakati kontrak berisi 29 pasal yang dimaksudkan untuk menata kembali hubungan antara pemerintah kolonial dan komunitas pertambangan Tionghoa. Akan tetapi, kesepakatan ini tidak sepenuhnya mampu meredakan konflik. Sejumlah kelompok kongsi menolak mengakui perjanjian tersebut, sehingga ketegangan kembali meningkat dan memaksa pemerintah kolonial mengambil langkah militer yang lebih tegas.

Serangkaian operasi militer kemudian dilakukan di wilayah Montrado dan sekitarnya sejak awal 1823. Pasukan kolonial di bawah pimpinan Letnan Kolonel De Stuers melancarkan beberapa serangan terhadap benteng-benteng kongsi dan berhasil menguasai sejumlah wilayah penting, termasuk Larah. Meskipun demikian, perlawanan dari pihak kongsi tetap berlangsung, sebagaimana terlihat dalam serangan besar Kongsi Thai Kong terhadap garnisun Belanda di Larah pada Februari 1823. Konflik ini pada akhirnya memaksa pemerintah kolonial melancarkan ekspedisi yang lebih besar, yang berujung pada penangkapan sejumlah pemimpin kongsi, pembubaran federasi Fo Sjoen, serta pemberlakuan sanksi terhadap para pemimpin yang dianggap sebagai penggerak perlawanan (Van Sandick, 1909, hal. 291).

Meskipun pemerintah kolonial sempat berhasil memaksakan sejumlah ketentuan baru dan mengangkat kapitan kongsi yang lebih kooperatif, stabilitas di wilayah pertambangan tidak berlangsung lama. Ketegangan kembali muncul ketika pemerintah kolonial menempatkan detasemen militer di kawasan pertambangan pada awal 1824. Kehadiran militer tersebut memicu kecemasan di kalangan komunitas Tionghoa dan memicu kembali konflik bersenjata, termasuk pertempuran di Singkawang pada September 1824 yang memaksa pasukan kolonial mundur sementara dari wilayah tersebut (Van Doren, 1865, hal. 8).

Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah kolonial berupaya memperkuat intervensinya melalui pengiriman pasukan tambahan dan rencana ekspedisi baru. Namun,

keterbatasan militer akibat keterlibatan pasukan Belanda dalam konflik di wilayah lain—termasuk Makassar dan kemudian pecahnya Perang Diponegoro pada 1825—membuat upaya penanganan konflik di Borneo Barat tidak pernah sepenuhnya tuntas. Akibatnya, hingga akhir masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin, konflik kongsi di wilayah pertambangan Montrado tetap berlangsung secara sporadis dan belum mencapai penyelesaian yang stabil.

Situasi ini menunjukkan bahwa konflik kongsi tidak hanya merupakan persoalan lokal komunitas pertambangan, tetapi juga menjadi arena persaingan pengaruh antara kesultanan, komunitas ekonomi Tionghoa, dan pemerintah kolonial. Dalam konteks tersebut, posisi Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin berada dalam situasi yang sulit, karena otoritas tradisional kesultanan semakin terdesak oleh intervensi kolonial sekaligus oleh dinamika internal kongsi yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang cukup besar di kawasan tersebut.

Kondisi Ekonomi Semasa Kepemimpinan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin

Perkembangan ekonomi Kesultanan Sambas pada masa Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin menunjukkan pola yang unik. Berbeda dengan banyak wilayah lain di Nusantara yang secara masif bergantung pada satu sektor ekonomi dominan, pilar-pilar pendapatan kesultanan bersifat majemuk. Sumber pendapatan tersebut mencakup ekspor-impor, pelayaran, perdagangan, serta pertambangan. Dalam tata niaga Kesultanan Sambas, pelabuhan, pelayaran, dan perdagangan merupakan elemen integral yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya saling menopang dan melengkapi dalam mendukung keberlangsungan institusi kesultanan. Kombinasi aktivitas inilah yang membentuk Kesultanan Sambas sebagai sebuah negara maritim. Hamilton (1828, hal. 279), mencatat bahwa hingga akhir masa pemerintahan Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin, Sambas masih dianggap sebagai negeri maritim terpenting di kawasan Kalimantan.

Ketika Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin berkuasa, ia menjalin kontrak dengan pemerintah kolonial dengan harapan dapat memakmurkan negerinya. Sayangnya, cita-cita tersebut tidak sejalan dengan kompensasi yang diberikan padanya. Keadaan semakin diperparah ketika Raffles membuka pelabuhan Singapura pada tahun 1819—yang menjadi pusat perdagangan paling strategis di Asia Tenggara. Akibatnya, Sambas mulai mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas perdagangannya. Namun demikian, Sultan tetap berupaya keras memperbaiki kondisi tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, Pelabuhan Sambas masih mampu bertahan sebagai pusat perdagangan, meskipun perannya lebih dominan dalam skala regional ketimbang internasional.

Sebagai catatan, jumlah kapal yang masuk ke Pelabuhan Sambas pada tahun 1822 dan 1823 masing-masing berjumlah 194 dan 209, sedangkan kapal yang berangkat tercatat sebanyak 107 dan 154. Adapun nilai impor dan ekspor pada tahun 1822 masing-masing mencapai f11.749 dan f3.809, sementara pada tahun 1823 angka tersebut meningkat menjadi f13.008 untuk impor dan f6.079 untuk ekspor. Sebagian kecil kapal tersebut memiliki rute ke arah Jawa; selebihnya datang dan pergi dari berbagai daerah lain di Nusantara (ANRI, *Borneo Westerafdeeling*, No.1). Meskipun hanya mencakup dua tahun, data ini menunjukkan pemulihan yang relatif signifikan dalam aktivitas maritim dan perdagangan Sambas di bawah kepemimpinan Sultan Anom.

Komoditas yang ditawarkan di Pelabuhan Sambas sendiri sangat beragam. Barang yang diperjualbelikan pada umumnya meliputi: beras, lilin, damar, kayu gaharu, sarang burung, agar-agar, tipar, debu emas, penyu laut, mutiara, kayu besi (ulin/belian), kayu eboni, serta berbagai jenis kayu lain yang sangat cocok untuk pembuatan perahu (Francis, 1856, hal. 318). Pelabuhan Sambas juga menerima berbagai barang impor, seperti candu, garam, minyak, tembakau, tekstil, kain, besi, dan barang pecah belah. Seluruh komoditas tersebut dapat diperoleh melalui transaksi tunai maupun barter (Heidhues, 2008, hal. 37).

Selain sektor perdagangan, aktivitas ekonomi penting lainnya di Kesultanan Sambas terletak pada sektor pertambangan. Secara ideal, pertambangan diharapkan menjadi salah satu penopang utama perekonomian kesultanan. Gagasan ini pada awalnya dibayangkan oleh Sultan Umar Aqamaddin II ketika mendatangkan para penambang Tionghoa ke wilayahnya untuk

mengembangkan tambang emas. Pada masa awal pengelolaan tambang tersebut, sultan dilaporkan memperoleh pendapatan sekitar 500 tahlil emas atau setara dengan kira-kira f32.000 setiap tahun (De Keyser, 1876, hal. 158–159). Namun, kondisi tersebut hanya berlangsung selama sekitar sepuluh tahun pertama. Setelah itu, para penambang mulai menolak membayar kewajiban mereka kepada istana. Situasi ini berkaitan dengan berkembangnya organisasi kongsi di kalangan penambang Tionghoa yang semakin mandiri secara ekonomi dan administratif, sehingga secara bertahap mengurangi ketergantungan mereka terhadap otoritas penguasa Melayu.

Besarnya potensi ekonomi dari sektor pertambangan sebenarnya cukup signifikan. Crawford (1820, hal. 147) memperkirakan bahwa satu unit tambang yang digarap sekitar 200 pekerja mampu menghasilkan antara 250–500 ons logam mulia dalam bentuk debu emas. Dengan jumlah tambang di wilayah Sambas yang mencapai sekitar 30 unit, total produksi emas diperkirakan berada pada kisaran 7.500–15.000 ons. Jika dikonversikan ke dalam satuan bungkal emas—dengan nilai berkisar antara 22–27 dolar Spanyol per bungkal—maka total nilai produksi tersebut dapat mencapai sekitar 2.450.250 hingga 4.900.500 dolar Spanyol (Crawford, 1820, hal. 147–148; Francis, 1856, hal. 318; Heidhues, 2008, hal. 39).

Meskipun potensi ekonominya sangat besar, sebagian besar keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut tidak mengalir ke kas Kesultanan Sambas. Kongsi-kongsi penambang cenderung mengalokasikan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, seperti pembiayaan tenaga kerja, logistik, serta pertahanan komunitas mereka sendiri. Akibatnya, kontribusi yang akhirnya disetorkan kepada sultan relatif kecil, yakni tidak lebih dari sekitar 160 bungkal emas per tahun atau sekitar 3.992 dolar Spanyol (Crawford, 1820, hal. 148). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi produksi emas di wilayah Sambas dan pendapatan yang benar-benar dapat dikendalikan oleh otoritas kesultanan. Dalam jangka panjang, situasi tersebut turut melemahkan posisi ekonomi politik istana, sekaligus memperkuat otonomi kongsi-kongsi pertambangan sebagai kekuatan ekonomi yang relatif independen di kawasan tersebut.

PENUTUP

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Pangeran Anom sebagai Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin (1815–1828) merupakan manifestasi kompleks dari ambivalensi antara otoritas tradisional dan tekanan kolonial. Di satu sisi, ia mewarisi legitimasi genealogis, reputasi maritim, serta kecakapan politik yang terbentuk sejak masa mudanya sebagai pelaut dan Pangeran Bendahara istana. Di sisi lain, ia harus menghadapi realitas struktural berupa meningkatnya intervensi kekuatan Barat dan melemahnya otoritas kesultanan terhadap kongsi-kongsi Tionghoa di wilayah pertambangan. Kondisi tersebut mendorong Sultan Anom mengambil langkah-langkah strategis yang dalam praktiknya justru membuka ruang bagi penetrasi kekuasaan kolonial. Kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1819, yang semula dimaksudkan sebagai upaya stabilisasi, pada akhirnya menjadi pintu masuk kontrol kolonial atas urusan internal kesultanan. Dengan demikian, kepemimpinannya mencerminkan paradoks antara upaya mempertahankan kedaulatan tradisional dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan ekspansi kekuasaan kolonial. Secara historiografis, temuan ini menegaskan bahwa melemahnya kedaulatan kesultanan di Kalimantan Barat tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan kolonial eksternal, tetapi juga oleh dinamika internal yang membatasi ruang manuver politik penguasa lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI. (Borneo Westerafdeeling No.1). *Laporan Umum mengenai Residensi Sambas tahun 1823*.
ANRI. (Borneo Westerafdeeling No.255). *Kontrak-kontrak dengan Borneo Barat tahun 1816*.
ANRI. (Borneo Westerafdeeling No.300). *Ringkasan surat keterangan Provivioneel Fingeerende Residen Sambas tahun 1823*.
Atsushi, O. (2010). "Pirates Or Entrepreneurs?" The Migration And Trade Of Sea People In Southwest Kalimantan, C. 1770-1820. *Trans-Regional Indonesia over One Thousand*, 90,

- 67–95. <https://www.jstor.org/stable/20798233>
- Baihaqi, A. F., Bryna, R. S., Ramadhan, F. S., & Panditra, A. M. (2025). Sengketa Maritim Di Kalimantan Barat: Dinamika Kesultanan, Kekuatan Eropa, Dan Aliansi Bajak Laut Tahun 1811-1850. *PURBAWIDYA*, 14(2), 363–379. <https://doi.org/https://doi.org/10.55981/purbawidya.2025.12272>
- Crawfurd, J. (1820). *History of the Indian Archipelago: Containing an Account of the Manners, Arts, Languages, Religions, Institutions, and Commerce of Its Inhabitants, Volume 3*. Archibald Constable And Co.
- De Keyser, J. P. (1876). *Neêrlands Bibliotheek: Oorspronkelyke Romans, Schetsen En Novellen Van Hedendaagsche Auteurs. Volume 10*.
- Fahmi, U. R. (2004). *Kajian Silsilah Keturunan Raja-Raja Sambas*. Istana Alwatzikhoebillah Sambas.
- Francis, E. A. (1856). *Herinneringen Uit Den Levensloop Van Een Indisch' Ambtenaar Van 1815 Tot 1851: Medegedeeld In Brieven. Volume 1*. H. M. Van Dorp.
- Garraghan, G. J. (1946). *A Guide To Historical Method*. Fordham University Press.
- Hamilton, W. (1828). *The East-India Gazetteer*. Wm. H. Allen & Co.
- Heidhues, M. S. (2008). *Penambang Emas, Petani, Dan Pedagang Di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Yayasan Nabil.
- Ismail, M. G. (1994). Trade and State Power: Sambas (West Borneo) in the Early Nineteenth Century. In G. J. Schutte (Ed.), *State and Trade in the Indonesian Archipelago*. Brill.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.
- Lapian, A. B. (2009). *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Komunitas Bambu.
- Lontaan, J. U. (1975). *Sejarah-Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan-Barat*. Pemda Tingkat I KalBar.
- Macdonald, D. (1840). *A Narrative Of The Early Life And Services Of Captain D. Macdonald, I. N.: Embracing An Unbroken Period Of Twenty-Two Years: Extracted From His Journal, And Other Official Documents* (3 ed.). Benson And Barling.
- Officieel Gedeelte. (1828, Oktober 11). *Javasche Courant*.
- Rahman, A., Achmad, Y., Anom, R. F. M. P., Muhadi, & Fahadi. (2001). *Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan Dan Pemerintah Daerah*. Dinas Pariwisata Pemda Kabupaten Sambas.
- Ritter, W. L. (1861). *Nacht En Morgen Uit Het Indische Leven. Volume 2*. J. C. Van Kesteren & Zoon.
- Tobias, J. H. (1828). Maccasar. *De Nederlandsche Hermes. Volume 5*, 3–99.
- Van Doren, J. B. J. (1865). *De Terugkomst Der Nederlanders, En De Uitbreiding Van Hun Gezag, Op Het Eiland Borneo: Ter Nagedachtenis Van Den Baron Van De Capellen, In Leven Gouverneur Generaal Over Nederlandsch-Indië*. J. D. Sybrandi.
- Van Sandick, L. H. W. (1909). *Chineezzen Buiten China*. M. Van Der Beek's Hofboekiiandel.
- Veth, P. J. (2017a). *Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis* (2 ed.). Institut Dayakologi.
- Veth, P. J. (2017b). *Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis* (1 ed.). Institut Dayakologi.